



RLPPD 2020



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	11
A. URUSAN PENDIDIKAN	11
B. URUSAN KESEHATAN	18
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	41
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	46
E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	50
F. URUSAN SOSIAL	60
BAB III HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	75
BAB IV REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	81
BAB V INOVASI DAERAH TAHUN 2020	86
BAB VI PENUTUP	89



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2020, dapat diselesaikan dengan baik.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Melalui penyusunan RLPPD, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan. Selain itu, pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai informasi kepada masyarakat sekaligus perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Mudah-mudahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020 ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lumajang, Maret 2021

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

BAB I
CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Kinerja makro sangat erat kaitannya dengan beberapa indeks yang memengaruhi pembangunan manusia.

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*).

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara IPM dan kemiskinan, terutama hubungan yang signifikan antara salah satu variabel IPM yaitu variabel daya beli dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Adapun capaian kinerja makro di Kabupaten Lumajang sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lumajang

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2019)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2020)	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,33	65,46	0,199
2	Angka Kemiskinan	9,49	9,83	3.583



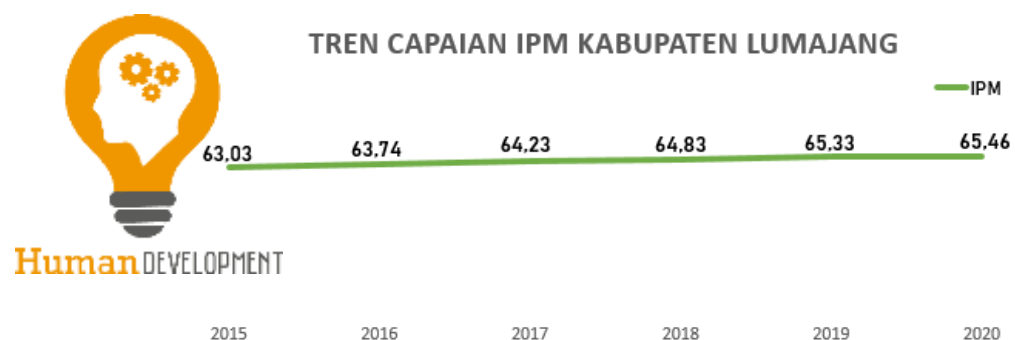
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2019)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2020)	PERUBAHAN (%)
3	Angka Pengangguran	2,84%	3,36%	18.31
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.77%	-2,79%	-158,491
5	Perdapatan Perkapita	31.29 juta	30,69 juta	-1,918
6	Ketimpangan pendapatan	0.364	0.364	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020,

1) Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.



Secara lebih detail Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Tabel 1.2
Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50	69,70	69,94	70,10
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,78	11,79	11,80	11,81
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,20	6,21	6,22	6,4
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.503	8.931	9.274	9.088
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,72	87,88	88,04	88,09
IPM		64,23	64,83	65,33	65,46
Pertumbuhan IPM	%	0,77	0,93	0,77	0,20

Sumber : Berita Resmi Statistik No.03/12/3508/XX, 30 Desember 2020

Berdasarkan tabel, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2017-2020 naik dari 64,23 pada Tahun 2017 menjadi 65,46 pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan laju 0,93 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,20. Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten yang mempunyai IPM kategori sedang di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2020, walaupun mengalami peningkatan, namun peringkat IPM Kabupaten Lumajang menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, untuk Kabupaten Lumajang perlu berbenah kembali agar nilai IPM membaik.

2) Angka Kemiskinan



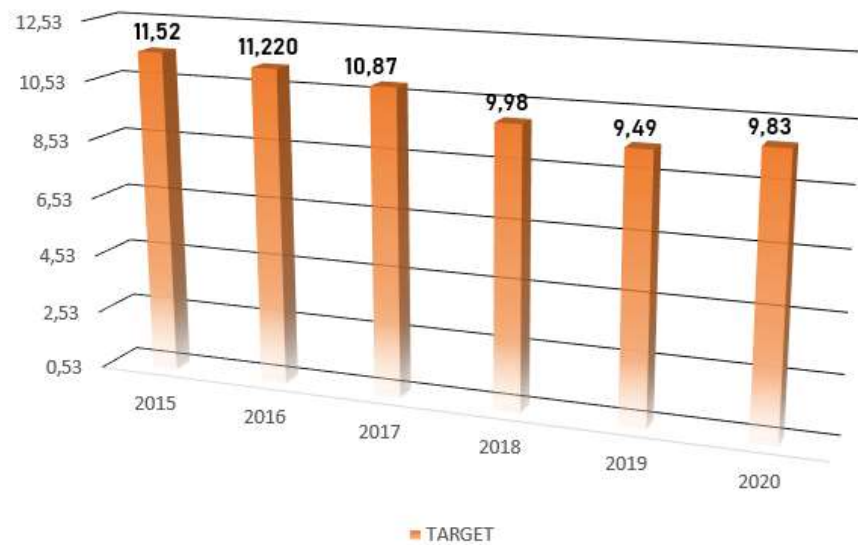
Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap wilayah.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

TREN CAPAIAN % PENDUDUK MISKIN



Detail data sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2017	112,65	10,87	1,60	0,37	267.366
2018	103,69	9,98	1,38	0,31	281.461
2019	98,88	9,49	1,09	0,2	296,633
2020	102,60	9,83	1,14	0,21	318,196

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020,

Kabupaten Lumajang selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan pada angka presentase penduduk miskin yakni Pada tahun 2018 sebesar 9,98% atau sebesar 103,69 ribu, kemudian pada tahun 2019 sebesar 9,49% atau sebesar 98,88 ribu dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan yaitu pada angka 9,83% atau sebesar 102.60 ribu. namun Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Indikator yang lain P1 dan P2 juga mengalami perubahan dari tahun 2018 sampai 2020 masing-masing adalah 1.38, 1.09 dan 1.14 untuk P1 dan 0.31, 0.20 dan 0.21 untuk P2. Perubahan persentase penduduk miskin pada level 9.83% di tahun 2020 ini masih bisa diartikan bahwa satu dari sepuluh penduduk Kabupaten Lumajang merupakan penduduk miskin. Dan makin naiknya kedalaman kemiskinan pada P1 = 1.14 memberikan arti bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk miskin sedikit tertekan menjauhi garis kemiskinan. Namun pada tahun 2020 ini pula, tercatat tingkat keparahan kemiskinan masih relative sama dengan tahun lalu yang berkisar di angka 20 % (Tahun 2019, P2 = 0.20 dan Tahun 2020, P2 = 0.21).

Angka yang didapatkan di Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan oleh semua parameternya, ini mencerminkan kondisi pandemi Covid-19 menginfeksi masyarakat Lumajang sehingga membuat kegiatan perekonomian sedikit terhambat. Dengan makin bertambahnya penduduk miskin dapat dikatakan bahwa taraf kesejahteraan penduduk yang tadinya tergolong tidak miskin tertekan sehingga menjadi penduduk miskin. Tetapi harapan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai amanah SDGs yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun perlu dilakukan. Perlu diupayakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini terobosan kegiatan sehingga para penduduk miskin bisa eksis kembali menjadi penduduk tidak miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lumajang masih dibawah provinsi antara tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	Daerah	2017	2018	2019	2020
1	KEMISKINAN	Jml Lumajang	112.650	103.690	98.880	102.600
		jml Jawa Timur	4.617.010	4.332.590	4.112.250	4.419.100
		% Lumajang	10,87	9,98	9,49	9,83
		% Jawa Timur	11,77	10,98	10,37	11,09

Sumber: * BPS 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur masih tergolong baik dikarenakan



masih dibawah Capaian Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun. Pada tahun 2017 di Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sejumlah 11,77%, sedangkan di Kabupaten Lumajang Masih sebesar 10,87 dan pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 11,09% atau 0,68% selama 4 (empat) tahun sedangkan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,04% atau sebesar 9,83%.

3) Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Lumajang diketahui pada tahun 2019 sebesar 2,84%, sedangkan di Tahun 2020 mencapai 3,36% Angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Nilai TPAK Kabupaten Lumajang selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, 66,75 persen di tahun 2015, menurun pada tahun 2017 menjadi 63,78 persen selanjutnya meningkat pada tahun 2019 sebesar 65,92 persen, sedangkan untuk tahun 2020 mencapai 66,9 persen,

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lumajang yang termasuk angkatan kerja sejumlah 557.754 dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

18.747 orang. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 275.914 orang, yang meliputi : 41.964 Pelajar; 191.116 Mengurus rumah tangga; 42.656 lain-lain.

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lumajang selama tahun 2017-2020, menunjukkan tren naik turun dan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	Daerah	2017	2018	2019	2020
1	TPT	Lumajang	2,91	2,55	2,84	3,36
		Jawa Timur	4,00	3,99	3,92	5,84

Sumber: * BPS Kabupaten Lumajang 2020

Dalam empat tahun terakhir TPT di Kabupaten Lumajang pada 2019 tingkat penganggur terbuka sebesar 2,84% dan naik 0,52 pada tahun 2020 menjadi 3,36%. Pencapaian TPT di Kabupaten Lumajang masih lebih baik dibanding dengan pencapaian TPT Provinsi Jawa Timur.

c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 mencapai 515.516 orang, kemudian meningkat menjadi 553.923 orang pada tahun 2018. Jumlah angkatan kerja yang meningkat dalam kurun waktu 2 tahun tersebut searah dengan angka TPAK, tahun 2017 sebesar 63,78 persen, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,10 persen. Angka TPAK yang menurun seiring dengan nilai TPT Kabupaten Lumajang yang juga mengalami penurunan. Nilai TPT di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 2,91 persen, mengalami sedikit penurunan

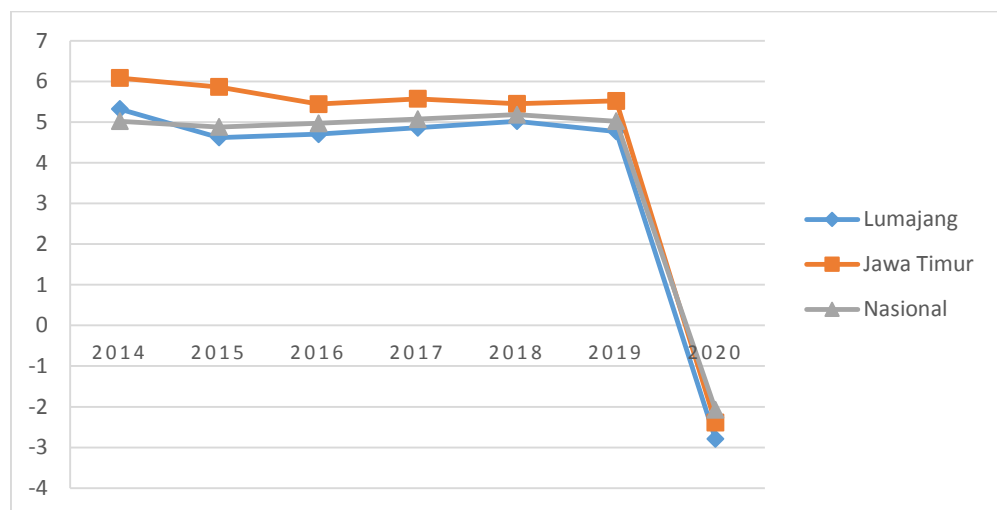


RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

dibanding tahun 2018 yang angkanya sebesar 2,55 persen. Dengan TPT sebesar 2,55 persen pada tahun 2018, artinya TKK pada saat itu sebesar 97,45 persen. Untuk nilai TKK tahun 2019 dan 2020 masih dalam proses perhitungan oleh BPS

4) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kontribusi per sektor PDRB terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan berdampak positif pada levelling besaran PDRB. Pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian/agraris ke sektor industri ataupun perdagangan yang merupakan ciri spesifik dari daerah perkotaan, penjelasan pertumbuhan riil PDRB dari tahun 2013 ke tahun 2019 sebagaimana grafik berikut :



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lumajang	5,32	4,62	4,70	4,86	5,02	4,77	-2,79
Jawa Timur	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45	5,52	-2,39
Nasional	5,02	4,88	4,97	5,07	5,18	5,02	-2,07

Ekonomi Lumajang Tahun 2019 tumbuh sebesar 4,77%, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,02 %. Menurut Lapangan Usaha, semua kategori mengalami pertumbuhan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,1%, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,93%. Kategori penyumbang ekonomi Lumajang masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 34,32% disusul kategori industri pengolahan sebesar 20,87% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,9%. Sementara *share* terkecil adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan kategori Pengadaan Listik dan Gas yang masing-masing sebesar 0,05% dan kategori Jasa Perusahaan sebesar 0,3%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 menurun drastis sampai dengan angka -2,79%, hal tersebut merupakan dampak dari pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19

5) Pendapatan Perkapita

Besar Angka Pendapatan per kapita Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.6
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

	2018	2019	2020
Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (juta Rp)	29,52	31,29	30,69

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Lumajang sebesar Rp 756.384. Dimana pengeluaran makanan sebesar Rp 433.284 yaitu 57,28% dari pengeluaran total dan pengeluaran non makanan sebesar Rp 323.100 yaitu 42,72% dari pengeluaran total. Terlihat dari tabel 2.6 Bahwa Pendapatan perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,918 dari Tahun 2019.



6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

Tabel 1.7
Indeks Gini Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

		2017	2018	2019	2020
Gini Ratio	Lumajang	0,31	0,30	0.364*)	0.364*)
	Jawa	0,42	0,37	0.364	0.364
	Timur				

Sumber : Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dan Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2020



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini.

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD,SMP)	100	2020
		Buku Teks Pelajaran	100	2020
		Perlengkapan Belajar	100	2020
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualitas S1/D-IV	100	2020
		Kualitas Tenaga Kependidikan (tenagaadmin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat	100	2020
		Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	100	2020
		Satuan Pendidikan yang Berakreditasi minimal C	100	2020
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100	2020
		Kualitas Pendidik yang Berkulifikasi S1/D-IV	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
URU 2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2020
		Modul Belajar	100	2020
		Perlengkapan Belajar	100	2020
		Jumlah Rombongan Belajar	100	2020
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100	2020
		Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	100	2020
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	100	2020
		Kualitas Tanaga Kependidikan (tenaga admin/tenagalab/admin) yang berkualifikasi SMA/ Sederajat	100	2020
		PKBM terakreditasi minimal C	100	2020
		3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Buku Gambar	100			2020
Alat Mewarnai	100			2020
Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	100			2020
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100			2020
Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	100			2020
Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	100			2020
Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	100			2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD,SMP)	146.983	123.330	83.90
		Buku Teks Pelajaran	123.330	5.816	4.71
		Perlengkapan Belajar	246.660	2.915	1.18
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualitas S1/D-IV	1.021	1.013	99.21
		Kualitas Tenaga Kependidikan (tenagaadmin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat	1.448	1.192	82.32
		Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	4.724	4.724	100
		Satuan Pendidikan yang Berakreditasi minimal C	955	953	99.79
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	123.330	123.330	100
		Kualitas Pendidik yang Berkulifikasi S1/D-IV	10.093	7.296	72.28
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	48.757	1.315	2.69
		Modul Belajar	1.315	24	1.82
		Perlengkapan Belajar	2.630	8	0.30
		Jumlah Rombongan Belajar	188	188	100
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.315	1.315	100
		Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	50	38	76
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	26	17	65.38



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	%
		Kualitas Tenaga Kependidikan (tenaga admin/tenagalab/admin) yang berkualifikasi SMA/ Sederajat	-	-	-
		PKBM terakreditasi minimal C	29	4	13.79
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi pendidikan PAUD	31.316	44.220	141
		Buku Gambar	530.640	2.814	0.53
		Alat Mewarnai	88.440	231	0.26
		Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	944	282	29.87
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	44.220	44.220	100
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	910	581	63.84
		Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.320	1.080	46.55
		Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	2.472	2.472	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019.	Capaian SPM 2020
			%	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	91,23	83.90
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,39	2.69
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	136,42	141



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019, pada jenis pelayanan pendidikan dasar mengalami penurunan dari capaian 91,23% menjadi 83,90%, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi. Sedangkan pada dua capaian lainnya yakni jenis pelayanan dasar Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini capaian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan seperti pada tabel yakni pada pendidikan kesetaraan capaian di Tahun 2019 0,39% menjadi 2,69% hal tersebut merupakan dampak signifikan dari inovasi gempita desa yang dilakukan Kabupaten Lumajang di Tahun 2020, untuk capaian Pendidikan anak usia Dini, capaiannya juga mengalami kenaikan yakni dari 136,42 % menjadi 141%, yang merupakan kondisi eksisting di Kabupaten Lumajang. Namun bila dilihat dari pencapaian SPM dengan beberapa indikator penjabar yang mendukung tercapainya 3 indikator utama SPM, maka Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2020 masih belum maksimal pada beberapa indikator disebabkan oleh beberapa indikator yang masih baru dan pandemi covid 19 yang membatasi dinas pendidikan baik dari segi waktu maupun anggaran sehingga hasil capaian SPM tidak maksimal .

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut :

KEGIATAN	SASARAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	(%)
Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD (APBN)	5080 Siswa Jenjang SD	12.574.350.000	-	10.272.150.000	82%
Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP (APBN)	2783 Siswa Jenjang SMP	7.363.500.000	-	5.608.875.000	76%
BOSDA SDN dan SMPN Se-Kab Lumajang (APBD)	Peserta didik SD dan SMP Negeri Se-Kab Lumajang	15.596.100.000	13.580.234.000	18.502.880.279	136%



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

KEGIATAN	SASARAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	(%)
BOS REGULAR SD dan SMP Negeri (APBN)	Peserta didik SD, SMP Negeri se Kabupaten Lumajang	74.571.200.000	94.039.089.308	92.758.843.719	99%
BOSDA SWASTA (APBD)	Peserta Didik SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Swasta se Kabupaten Lumajang	9.474.500.000	-	9.474.500.000	100%
BOSDA MADIN (APBD Prov & APBD Kab)	Madrasah Diniyah	8.835.000.000	8.834.400.000	8.834.400.000	100%
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah (APBD)	Peserta didik baru SD, MI, SMP, Mts, Negeri, dan Swasta Se-Kab Lumajang	9.451.860.000	8.096.610.000	7.818.384.200	97%

5. Dukungan Personil

a. Status Kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS)	:	52 orang
- Tenaga kontrak	:	43 Orang

b. Latar belakang pendidikan PNS

- Magister (S2)	:	12 orang
- Sarjana (S1)	:	17 orang
- Sarjana muda/Diploma III (D3)	:	- orang
- Sarjana muda/Diploma II (D2)	:	- orang
- Sarjana muda/Diploma I (D1)	:	- orang
- SLTA	:	23 orang
- SLTP	:	- orang
- SD	:	- orang

c. Pangkat dan golongan

- Pembina Utama (IV/d)	:	1 orang
- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	8 orang



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	4 orang
- Pembina (IV/a)	:	3 orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	8 orang
- Penata Tingkat I (III/c)	:	1 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	7 orang
- Penata Muda (III/a)	:	- orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	6 orang
- Pengatur (II/c)	:	4 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	9 orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	2 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	- orang
- Juru (I/c)	:	- orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	- orang
d. Pejabat struktural dan fungsional		
- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	21 orang
- Fungsional Pengawas	:	8 orang
- Guru	:	3.376 orang

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Indikator SPM belum masuk ke dalam RPJMD dan Renstra sehingga Pada Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan masih belum terfokus pada indikator SPM yang berdampak pada capaian SPM Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang masih belum maksimal;
2. Terdapat data yang diduga (suspect) tidak berada di sekolah (penduduk usia 5-18 tahun) hasil evaluasi dapodik dan emis Kemenag. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki angka rata-rata lama sekolah rendah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

3. Banyaknya Peserta Didik yang sudah memasuki jenjang sekolah sebelum usia standar.

B. Solusi

1. Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik. Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bappeda untuk memasukkan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan dengan akurat. Untuk partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidup;
3. Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019 tentang aturan syarat masuk bagi peserta didik baru untuk jenjang TK, SD dan SMP. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut mengatur tentang batas usia minimal masuk TK, SD dan SMP dalam penerimaan anak didik baru.

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Vaksin Tetatus Difetri (Td)	100	2020
		• Tablet Tambah Darah	100	2020
		• Alat Deteksi resiko Ibu Hamil (tes kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Gol Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin)	100	2020
		• Kartu ibu / rekam Medis Ibu	100	2020
		• Buku KIA	100	2020
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Formulir Fotograf	100	2020
		• Kartu ibu / Rekam Medis Ibu	100	2020
		• Buku KIA	100	2020
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Vaksin Hepatitis B0	100	2020
		• Vitamin K1 Injeksi	100	2020
		• Salep / tetes Mata Antibiotik	100	2020
		• Formulir Bayi Baru lahir	100	2020
		• Formulir MTBM	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku	100	2020
		• Formulir DDTK	100	2020
		• Buku KIA	100	2020
		• Vitamin A Biru	100	2020
		• Vitamin A Merah	100	2020
		• Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	100	2020
		• Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	100	2020
		• Jarum Suntik dan BHP	100	2020
		• Peralatan Anafilatik	100	2020
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Buku Rapor Kesehatanku	100	2020
		• Buku Pemantauan Kesehatan	100	2020
		• Kuisisioner Skrining Kesehatan	100	2020
		• Formulir Rekapitulasi hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah	100	2020
		• Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	100	2020
		• Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	100	2020
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Media KIE (alat ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol, KIT IVA Tes) 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 	100	2020
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolestrol) 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G) 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Buku Kesehatan Lansia 	100	2020
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Tensimeter 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM 	100	2020
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet 	100	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM 	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		• Pedoman dan Media KIE	100	2020
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2020
		• Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia)	100	2020
		• Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	100	2020
		• Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	100	2020
		• Media KIE	100	2020
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner)	100	2020
		• Reagen Zn TB	100	2020
		• Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	100	2020
		• Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	100	2020
		• Catridge Tes Cepat Molekuler	100	2020
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan	100	2020
		• Pedoman/standar Operasional Prosedur	100	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
		• Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner	100	2020
		• Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai, Alat Tulis, Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 	100	2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
I.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	15.377	14.575	94.78
		<ul style="list-style-type: none"> Vaksin Tetatus Difetri (Td) 	10.811	8.870	82
		<ul style="list-style-type: none"> Tablet Tambah Darah 	15.377	15.016	97.65
		<ul style="list-style-type: none"> Alat Deteksi resiko Ibu Hamil (tes kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Gol Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin 	15.377	16.727	108.7
		<ul style="list-style-type: none"> Kartu ibu / rekam Medis Ibu 	15.377	16.727	108.7
		<ul style="list-style-type: none"> Buku KIA 	15.377	16.727	108.7



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	14.678	15.432	105.1
		• Formulir Fotograf	14.678	15.436	98.35
		• Kartu ibu / Rekam Medis Ibu	14.678	15.436	98.35
		• Buku KIA	14.678	15.436	98.35
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	13.979	14.176	101
		• Vaksin Hepatitis B0	13.576	13.578	100
		• Vitamin K1 Injeksi	13.976	14.742	105.4
		• Salep / tetes Mata Antibiotik	13.976	14.742	105.4
		• Formulir Bayi Baru lahir	13.976	14.742	105.4
		• Formulir MTBM	13.976	14.742	105.4
		4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	56.297
• Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku	56.297			56.857	100
• Formulir DDTK	56.297			56.857	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		• Buku KIA	56.297	56.857	100
		• Vitamin A Biru	13.201	14.195	107.5
		• Vitamin A Merah	14.678	13.326	90.7
		• Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	17.696	23.103	130.5
		• Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	24.598	20.891	84.92
		• Jarum Suntik dan BHP	33.143	34.690	104
		• Peralatan Anafilatik	26.078	11.186	42.89
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	138.091	117.980	85.43
		• Buku Rapor Kesehatanku	57.405	29.797	51.9
		• Buku Pemantauan Kesehatan	53.059	32.740	61.7
		• Kuisoner Skrining Kesehatan	109.386	68.373	62.5
		• Formulir Rekapitulasi hasil	103.563	66.527	64.23



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah			
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah 	49.462	32.526	65.75
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	669.386	345.560	51.62
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Media KIE (alat ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol, KIT IVA Tes) 	357.373	190.563	53.32
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 	369.836	90.277	24.41
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan	152.725	95.248	62.58



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		layanan kesehatan			
		• Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolestrol)	152.196	95.248	62.58
		• Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G)	152.196	95.248	62.58
		• Buku Kesehatan Lansia	152.196	2.000	1.31
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	277.872	82.600	29.72
		• Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	156.329	51.050	32.65
		• Tensimeter	158.115	55.083	34.83
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	134.510	17.326	12.88



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	21.374	20.652	96.62
		• Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	13.561	12.392	91.37
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM	10.543	5.859	55.57
		• Pedoman dan Media KIE	10.008	7.439	74.33
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.984	2.324	117.1
		• Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia)	1.087	990	91.07
		• Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	563	314	55.77
		• Penyediaan Formulir	1.395	1.264	90.6



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		Pencatatan dan Pelaporan			
		• Media KIE	1.771	1.435	81.02
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	11.794	8.572	72.68
		• Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner)	52	42	80.76
		• Reagen Zn TB	333	317	95.19
		• Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	3.100	3.020	97.41
		• Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	8.558	7.159	83.65
		• Catridge Tes Cepat Molekuler	500	500	100
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2.732	2.751	100.6
		• Pedoman/standar Operasional Prosedur	44	44	100
12	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus	17.788	14.506	81.54



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
	dengan risiko terinfeksi HIV	yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan			
		<ul style="list-style-type: none"> Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner 	205	7	3.41
		<ul style="list-style-type: none"> Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 	18.317	15.421	84.18
		<ul style="list-style-type: none"> Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai, Alat Tulis, Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 	15.421	13.085	84.85

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
			%	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	95,87	94.78
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	103,31	105.1
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	101,51	101



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
			%	%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	89,27	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	95,32	85.43
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	79,44	51.62
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	79,91	62.58
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	50,48	29.72
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	101,81	96.62
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	101,36	117.1
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	92,28	72.68
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	41.16	81.54

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.463.953.000	3.338.622.387	74.79
	Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga	4.463.953.000	3.338.622.387,00	74.79
2	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit	30.849.391.579	14.617.874.050	43.47



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	8.428.648.393	3.768.205.350	44.71
	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan jiwa	8.170.725.093	3.745.880.350	45.85
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	14.250.018.093	7.103.788.350	49.85
	Jumlah Total	35.313.344.579	17.956.496.437	50.84

5. Dukungan Personil

Status kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS) : 587 orang
- Tenaga kontrak : 372 orang

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga
1	Dokter Umum	190
2	Dokter Gigi	209
3	Dokter Spesialis	32
4	Perawat	1.369
5	Bidan	598
6	Kesmas	58
7	Kesling	43
8	Ahli Gizi	86
9	Apoteker/Teknis kefarmasian	171

7. Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil tidak mencapai target renja maupun target SPM.

Permasalahan :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- a. Dimasa pandemi ada ketakutan pada masyarakat khususnya ibu hamil untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya sehingga lebih banyak memeriksakan pada usia kehamilan yang sudah besar.
- b. Adanya aturan di masa pandemi untuk membatasi jam layanan sehingga jam kerja di semua fasilitas kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak berkurang, dan jumlah pasien yang di layani juga di batasi, hal ini berdampak ibu hamil tidak semua bisa memeriksakan kehamilannya sesuai jadwalnya.
- c. Belum semua wilayah dan ibu hamil yang ada di wilayah bisa mengases internet sehingga program pemantauan ibu hamil secara virtual tidak bisa dilakukan.
- d. Karena Pandemi kegiatan kelas ibu hamil tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga pemantauan ibu hamil tidak bisa dilakukan karena beberapa daerah dengan zona covid oranye dan merah tidak boleh melakukan kegiatan tatap muka, sedangkan kegiatan secara virtual tidak semua ibu hamil bisa mengikuti.
- e. Masih ada ibu hamil yang periksa awal pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu

Solusi :

- a. Promosi dan Edukasi pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil secara standar.
- b. Memaksimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil secara virtual bila daerah tersebut masih dalam kondisi zona merah dan oranye tentang covid-19. bisa melalui WA grup, telpon, zoom, atau media virtual lainnya yang mudah diakses oleh semua ibu hamil.
- c. Memaksimalkan untuk melakukan konseling virtual kepada petugas kesehatan yang merawatnya (bidan/dokter) sebelum melakukan kunjungan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan / E-Regestrasi dulu sebelum berkunjung ke faskes agar tidak menumpuk di tempat fasilitas kesehatan dan pelayanan bisa berjalan dengan cepat.
- d. Meningkatkan *home visit/home care* pada ibu hamil terutama untuk ibu hamil yang risiko tinggi dan komplikasi
- e. Optimalisasi pelaksanaan *Telemedicine* mulai Ponkesdes/Polindes/Pustu sampai Puskesmas



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

2. **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target renja dan SPM.

3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah mencapai target renja dan SPM.

4. **Pelayanan Kesehatan Balita**

Pelayanan kesehatan balita sudah mencapai target renja maupun target SPM

5. **Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar**

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM

Permasalahan :

- a. kegiatan penjangkaran siswa usia pendidikan dasar tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid 19 dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring

Solusi :

- a. Melibatkan peran guru dalam pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar
 - b. Melakukan pelayanan kesehatan dengan melalui media *Online (google form)* dan melibatkan orangtua untuk bisa melakukan deteksi secara sederhana
 - c. Melakukan janji temu untuk kasus yang perlu mendapat penanganan dan pengobatan
6. **Pelayanan Kesehatan Usia Produktif**
- Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun target SPM. Pelayanan kesehatan usia produktif merupakan salah satu jenis pelayanan dalam pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Permasalahan :

- a. Terjadi pandemic covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan
- b. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM ;
 - Puskesmas pandu PTM
 - SI PTM
 - Penanganan klinis Hypertensi dan Kencing manis
- c. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- d. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.

Perkiraan kebutuhan anggaran :

Untuk pengadaan pemeriksaan glukosa darah :

Jumlah sasaran 669.386 orang @ Rp.10.000,- = Rp. 6.693.860.000,-

- e. Banyaknya Faktor risiko/kasus DM di masyarakat (angka kasus DM sangat tinggi)

f. PROGRAM POSBINDU

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat ttg pemanfaatan Posbindu masih kurang
2. Dukungan dan peran lintas sector masih rendah
3. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
4. Belum semua instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan / komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
5. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
6. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
7. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
8. Belum ada media konseling PTM posbindu
9. kurangnya media KIE terkait Pengendalian PTM
10. Belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

Solusi :

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat, mengingat kasus PTM merupakan *factor comorbide* kesakitan dan kematian pada penderita Covid-19
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan (Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas /pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan
- d. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
- e. Peningkatan kapasitas kader



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif

- f. Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
- g. Penguatan anggaran
- h. Peningkatan peran lintas program lintas sektor

7. **Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**

Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target renja maupun target SPM

Permasalahan :

- a. Usia Lanjut (Lansia) adalah sasaran pelayanan kesehatan yang risiko tinggi dan termasuk kelompok rentan utamanya pada masa Pandemi
- b. Pelayanan Usia Lanjut selama ini lebih banyak dilakukan diluar gedung (Posyandu) dimana pada masa pandemi Posyandu Lansia tutup sehingga pelayanan kepada usia lanjut tidak bisa mencapai target

Solusi :

- a. Optimalisasi pelayanan usia lanjut melalui kunjungan rumah
- b. Optimalisasi pelayanan *Telemedicine* mulai Polindes/Ponkesdes/Pustu dan Puskesmas
- c. Memenuhi sarana prasana dalam melakukan kegiatan luar gedung (Lansia Kit)
- d. Mengoptimalkan kegiatan dengan metode virtual
- e. Hal-hal yang belum dan tidak dapat terlaksana karena pandemic akan di rencanakan dan di laksanakan di tahun 2021 dengan menerapkan protokol AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

8. **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai target renja maupun target SPM. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi merupakan salah satu jenis pelayanan dalam pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Permasalahan :

- a. Terjadi pandemic covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan
- b. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM ;
 - Puskesmas pandu PTM



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- SI PTM
- Penanganan klinis Hypertensi dan Kencing manis
- c. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
Perkiraan kebutuhan anggaran :
Untuk pengadaan pemeriksaan glukosa darah :
Jumlah sasaran 669.386 orang @ Rp.10.000,- = Rp. 6.693.860.000,-
- e. Banyaknya Faktor risiko/kasus DM di masyarakat (angka kasus DM sangat tinggi)
- f. PROGRAM POSBINDU
 1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat ttg pemanfaatan Posbindu masih kurang
 2. Dukungan dan peran lintas sector masih rendah
 3. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
 4. Belum semua instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan / komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
 5. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
 6. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
 7. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
 8. Belum ada media konseling PTM posbindu
 9. kurangnya media KIE terkait Pengendalian PTM
 10. Belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

Solusi :

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat, mengingat kasus PTM merupakan *factor comorbide* kesakitan dan kematian pada penderita Covid-19
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan (Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas /pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- d. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
- e. Peningkatan kapasitas kader
Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
- f. Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
- g. Penguatan anggaran
- h. Peningkatan peran lintas program lintas sektor

9. **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus tidak mencapai target renja dan SPM. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus merupakan salah satu jenis pelayanan dalam pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Permasalahan :

- a. Terjadi pandemic covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan
- b. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM ;
 - Puskesmas pandu PTM
 - SI PTM
 - Penanganan klinis Hypertensi dan Kencing manis
- c. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- f. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.

Perkiraan kebutuhan anggaran :

Untuk pengadaan pemeriksaan glukosa darah :

Jumlah sasaran 669.386 orang @ Rp.10.000,- = Rp. 6.693.860.000,-

- g. Banyaknya Faktor risiko/kasus DM di masyarakat (angka kasus DM sangat tinggi)
- h. PROGRAM POSBINDU
 - 1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat ttg pemanfaatan Posbindu masih kurang
 - 2. Dukungan dan peran lintas sector masih rendah



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

3. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
4. Belum semua instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan / komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
5. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
6. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
7. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
8. Belum ada media konseling PTM posbindu
9. kurangnya media KIE terkait Pengendalian PTM
10. Belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

Solusi :

1. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat, mengingat kasus PTM merupakan *factor comorbide* kesakitan dan kematian pada penderita Covid-19
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
3. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan (Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas /pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan
4. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
5. Peningkatan kapasitas kader
 - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
 - f. Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
 - i. Penguatan anggaran
 - j. Peningkatan peran lintas program lintas sektor
10. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target renja dan SPM.
11. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target renja maupun target SPM.

Permasalahan

- a. Tidak ada pencarian aktif ke desa oleh tenaga pustu dan ponkesdes.
- b. Tidak ada kontak tracing (pemeriksaan kontak penderita baru) pada keluarga dan kepada 15 orang di sekitarnya.
- c. gerakan 115 oleh kader tidak semua aktif, karena masa pandemi.

Solusi

- a. mengakibatkan kembali pencarian oleh tenaga pustu ponkesdes melalui puskesmas keliling
- b. Melakukan pemeriksaan kontak tracing stiap ada kasus baru

12. **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak mencapai target renja maupun target SPM.

Permasalahan

- a. Koordinasi pelaporan SIHA di tingkat layanan belum optimal, layanan program berupa testing pada dan KIE pada masyarakat beresiko telah dilaksanakan, tapi belum terdokumentasi dalam SIHA secara optimal karena kendala teknis Sistem pelaporan SIHA baik dari operator entry siha di layanan (sering bergonta ganti karena mutasi) atau masalah perangkat yang tidak mendukung sistem SIHA (sering bongkar pasang program SIHA Offline).
- b. Kendala dalam menggali faktor resiko dan keterkaitannya pada masyarakat beresiko HIV (misal pada kelompok kunci LSL, penasun, transgender) ada pada subyektivitas kemampuan komunikasi SDM nakes terlatih pada proses anamnesa yang ada di layanan, meskipun sudah dilakukan konseling, nakes kita masih terkendala menentukan faktor resiko pada sasaran tes. sehingga dalam pelaporan SIHA, faktor resiko HIV utama belum tergalii dan tidak masuk dalam kriteria definisi operasional SPM HIV, contoh: seorang pasien setelah anamnesa di tes HIV karena resiko perilaku seksualnya, sebenarnya pasien ini adalah anggota kelompok Gay (LSL) dan heteroseksual, tapi dalam laporan SIHA dimasukkan dalam



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

- kriteria pelanggan Penjaja Seks (Kriteria pelanggan penjaja Seks secara eksplisit tidak termasuk dalam definisi operasional SPM HIV)
- c. Secara administratif karena fokus dalam penanganan COVID 19, proses inisiasi pelayanan program HIV (mulai testing hingga pengobatan ARV) di beberapa tempat layanan puskesmas belum bisa dilaksanakan

Solusi

- a. Tetap memfasilitasi kendala teknis dilapangan dengan menyediakan waktu khusus dalam pertemuan untuk pelatihan singkat operator baru; menganjurkan kepada layanan dalam advokasi pengelola sarpras untuk penyediaan perangkat yang memiliki spesifikasi standard minimal sistem laporan SIHA
- b. Memberikan feedback dan arahan pada layanan setiap bulan jika didapatkan data yang belum merujuk pada spesifikasi definisi operasional SPM HIV dalam proses validasi data
- c. memberikan advokasi pada pemegang kebijakan untuk tetap memotivasi dan memfasilitasi layanan untuk segera melengkapi dan berproses sehingga layanan dapat segera melayani mulai testing hingga pengobatan ARV

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	2020
		b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	2020
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2020
		c. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	100	2020
		d. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	100	2020
		e. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	361.504	78.271	21.65
		Pelayanan SPAM jaringan perpipaan	361.504	70.920	19.61
		Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	361.504	7.351	2.03
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	296.779	9.904	3.3
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	274.423	1.381	0.5
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih	22.356	794	3.5



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan			
		Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	296.779	8.523	2.87

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
			%	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74,94	21.65
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	65,68	3.3

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN	8,317,072,200	6,967,702,872	83.79
	Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	703.807.200	696.889.541	99.02
	Peningkatan Pelayanan Air Minum	7.355.865.000	6.024.705.558	81.90



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT IPALD)	257.400.000	246.107.773	95.61
2 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	0	Self Blocking	0
Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	0	Self Blocking	0

5. Dukungan Personil

1. Status kepegawaian			
- Pegawai negeri sipil (PNS)	:	8 orang	
- Tenaga kontrak	:	26 orang	
2. Pejabat struktural dan fungsional			
- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	7 orang	
- Fungsional	:	1 orang	

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Debit air pada musim kemarau berkurang, dan sebaliknya pada saat musim penghujan bertambah, sehingga mempengaruhi kinerja target pelayanan air minum;
2. Minimnya regulasi terkait air minum;
3. Kurangnya kompetensi teknis kegiatan air minum jika pelaksanaan program dilakukan secara swakelola;
4. Sulitnya merubah perilaku masyarakat untuk BAB di sungai;
5. Mayoritas tangki septik yang dimiliki masyarakat belum SNI;
6. Permasalahan kesediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal;
7. Kurangnya kompetensi teknis kegiatan air limbah domestik jika pelaksanaan program dilakukan secara swakelola.

B. Solusi

1. Memperbesar investasi untuk pembangunan infrastruktur air minum;
2. Penyusunan peraturan Bupati, Peraturan Daerah terkait air minum;
3. Penambahan anggaran untuk penyusunan regulasi;



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

4. Peningkatan kapasitas pelaksana swakelola;
5. Membangun infrastruktur tangki septik individual dan memberikan sosialisasi untuk mengubah perilaku masyarakat;
6. Memfaatkan lahan pribadi atau lahan Pemerintah Desa untuk pembangunan IPAL Komunal.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2020
a.		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	100	2020
b.		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		c. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	100	2020
		d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	2020
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2020
		e. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	100	2020
		f. Subsidi Uang Sewa	100	2020
		g. Penyediaan Rumah Layak Huni	100	2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	-	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-
		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-
		Subsidi Uang Sewa	-	-	-
		Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.200.942.000	2.907.863.115	90.84
	Fasilitasi Penyediaan Rumah	894.535.000,00	768.960.650,00	85.96
	Perijinan Perumahan dan Tata Bangunan	1.046.634.800,00	995.823.579,40	95.15
	Pengembangan Kawasan Permukiman	1.259.772.200,00	1.143.078.886,33	90.74



5. Dukungan Personil

1. Status kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS)	:	10 orang
- Tenaga kontrak	:	30 orang

2. Pejabat struktural dan fungsional

- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	10 orang
- Fungsional	:	- orang

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;
2. Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimalnya;
3. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;
4. Tidak adanya program Pemerintah yang bersinggungan langsung dengan permukiman warga sehingga capaian indikator spm nihil.

B. Solusi

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;
2. Perencanaan Anggaran yang baik agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik;
3. Melakukan Bimtek terhadap karyawan atau melakukan perekrutan tenaga ahli / Teknis;
4. Mensosialisasikan indikator SPM secara rutin kepada OPD terkait agar dapat dimasukkan dalam program kegiatan sehingga indikator spm bisa tercapai.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100	2020
		a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	2020
		b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100	2020
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100	2020
		c. Penegakan Perda sesuai SOP	100	2020
		d. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	100	2020
		e. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	100	2020
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		f. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100	2020
		g. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100	2020
		h. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100	2020
		i. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	2020
		j. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100	2020
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana	100	2020
		k. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2020
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2020
		l. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2020
		m. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100	2020
		n. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		o. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100	2020
		p. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	2020
		q. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	100	2020
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2020
		r. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100	2020
		s. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	100	2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	-
		a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	-	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
	Mutu dan pelayanan ganti rugi	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	-	-	-
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	276	276	100
		c. Penegakan Perda sesuai SOP	276	276	100
		d. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	276	276	100
		e. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	276	276	100
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1117636	833376	75
		f. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100
		g. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	279853	267634	96
		h. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	279853	3.457	1
		i. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	594899	549899	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		j. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100	100	100
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana	1117636	860871	77
		k. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1117636	860871	77
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	279853	279853	100
		l. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	279853	279853	100
		m. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	30952	30952	100
		n. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	87717	87717	100
		o. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	156	156	100
		p. Pelaksanaan pencarian,	3465	3465	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		pertolongan evakuasi korban bencana			
		q. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	56757	56757	100
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	39	39	100
		r. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	39	39	100
		s. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	-	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM			
	PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	208.317.000	203.058.000	97.48
	Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum antara pemerintah daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan Operasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum			
		114.260.000,00	113.844.500,00	99.64
		35.025.000	30.188.500,00	86,19
2	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	894.568.000	873.231.110	97.61
	Penyuluhan masyarakat Yang Responsif Gender dalam pemahaman produk hukum daerah	503.988.000	489.786.860	97.18
	Pembinaan yang Responsif Gender dan Pengawasan dalam penegakan produk hukum daerah	243.320.500	242.292.750	99.58
	Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah	47.645.000	45.099.000	94.66
3	PROGRAM PEMBERANTASAN	495.194.750	485.432.750	98.03



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

BARANG KENA CUKAI			
ILEGAL			
Operasi Pemberantasan			
Barang Kena Cukai			
Illegal Bersama dengan			
Kantor Wilayah Bea	428.515.750	426.303.250	99.48
Cukai dan/atau kantor			
Pelayanan Bea Cukai			
Setempat			
4	PROGRAM		
PENINGKATAN			
KEAMANAN DAN	2.109.349.000	2.107.649.000,00	99.92
KENYAMAN			
LINGKUNGAN			
Pengendalian			
keamanan dan	2.109.349.000	2.107.649.000	99.92
kenyamanan			
lingkungan			
5	PENCEGAHAN,		
KESIAPSIAGAAN DAN			
LOGISTIK	869.895.000	867.064.350	99.67
PENANGGULANGAN			
BENCANA			
Pengadaan dan			
Pengelolaan Logistik	480.095.000	477.390.000	99.44
Bencana			
Peningkatan			
Pencegahan dan	389.800.000	389.674.350	99.97
Penguatan			
Kesiapsiagaan Bencana			
6	PENANGANAN		
TANGGAP DARURAT DAN	941.180.000	941.065.000	99.99
PEMULIHAN PASCA			
BENCANA			



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Penanganan Darurat Bencana	859.455.000	859.415.000,00	100
Penanggulangan Pasca Bencana	81.725.000	81.650.000	99.91
7 PROGRAM			
PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	771.400.500	770.783.875	99.92
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	771.400.500	770.783.875	99.92

5. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	39	Orang
	Tenaga kontrak	165	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Perlindungan Masyarakat	16	Orang
	Penegakan Perda	11	Orang
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	152	Orang
	Pemadam Kebakaran	24	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2020

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	16	Orang
	Tenaga kontrak	50	Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	2	Orang
	Golongan II	5	Orang
	Golongan III	7	Orang
	Golongan IV	2	Orang
Lain-lain	TRC OPD	25	Orang
	Relawan	30	Orang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Belum di tetapkannya Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

2. Belum disusunnya 8(delapan) Rencana Kontinjensi bencana alam dan bencana non alam.
3. Dalam penyusunan perencanaan yang berkaitan dengan SPM OPD masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara perencanaan SPM, karena SPM yang berlaku saat ini (Permendagri nomor 100 Tahun 2018) sejak diberlakukannya belum ada sosialisasi dan petunjuk dari Instansi terkait;
4. Kurangnya Koordinasi antara OPD dengan Instansi terkait (Bagian Administrasi Pemerintahan) Tentang indikator capaian SPM;
5. Untuk tahun anggaran tahun anggaran 2021 implentasi SPM sudah tercover dalam perencanaan (Renstra Satpol PP) namun belum bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran dikarenakan pandemi covid 19.

B. Solusi

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kordinasi dengan lintas sector terkat penanggulanagn bencana;
2. Memperluas jaring informasi dalam bidang penanggulangan bencana;
3. Penggalangan relawan masyarakat dan dunia usaha dalam penaggulangan bencana;
4. Selalu berkordinasi dengan instansi terkait (Bagian Tata Pemerintahan) tentang indikator SPM agar hasil capaian SPM bisa mendapatkan nilai maksimal;
5. Memksimalkan Koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan dan Bappeda Agar indikator capaian SPM bisa di implementasikan ke dalam program dan kegiatan yang ada pada Satpol PP kabupaten Lumajang;
6. OPD memohon penambahan anggaran agar implementasi SPM bisa dianggarkan pada tahun berikutnya, sesuai dengan program kegiatan yang ada dalam renstra Satpol PP.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

F. URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2020
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah memiliki Kendaraan Khusus Layanan rehabilitasi social dasar diluar panti	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2020
		Penyediaan Permakanan	100	2020
		Penyediaan Sandang	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Alat Bantu	100	2020
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2020
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	100	2020
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	100	2020
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2020
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2020
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	2020
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2020
		Layanan Rujukan	100	2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2020
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2020
		Penyediaan Permakanan	100	2020
		Penyediaan Sandang	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Alat Bantu	100	2020
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2020
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual & Sosial	100	2020
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100	2020
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2020
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2020
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100	2020
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2020
		Layanan Rujukan	100	2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2020
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2020
		Penyediaan Permakanan	100	2020
		Penyediaan Sandang	100	2020
		Penyediaan Alat Bantu	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2020
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100	2020
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	100	2020
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2020
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100	2020
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	2020
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2020
		Layanan Rujukan	100	2020
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	2020
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2020
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2020
		Penyediaan Permakanan	100	2020
		Penyediaan Sandang	100	2020
		Penyediaan Alat Bantu	100	2020



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2020
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100	2020
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	100	2020
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2020
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2020
		Pemberian Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2020
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2020
		Layanan Rujukan	100	2020
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	2020
		Penyediaan Permakanan	100	2020
		Penyediaan Sandang	100	2020
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100	2020
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100	2020
		Pelayanan Dukungan Psikososial	100	2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
I.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh	5.041	4.795	95.12



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
	terlantar di luar panti sosial	rehabilitasi sosial diluar panti			
		Layanan Data dan Pengaduan	5.041	4.795	95.12
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah memiliki Kendaraan Khusus Layanan rehabilitasi social dasar diluar panti	5.041	-	-
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	5.041	-	-
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	5.041	-	-
		Penyediaan Permakanan	5.041	4.795	95.12
		Penyediaan Sandang	5.041	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	5.041	258	5.11
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5.041	-	-
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	5.041	4.795	95.12



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	5.041	60	1.1
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5.041	15	0.29
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	5.041	446	8.8
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.041	200	3.9
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.041	79	1.5
		Layanan Rujukan	5.041	16	0.3
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	465	131	28.17
		Layanan Data dan Pengaduan	465	131	28.17
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	465	-	-
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	465	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	465	-	-
		Penyediaan Permakanan	465	51	3.2
		Penyediaan Sandang	465	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	465	-	-
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	465	-	-
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual & Sosial	465	131	28.17
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	465	40	8.6
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	465	9	1.9
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	465	40	8.6
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	465	21	4.5
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	465	10	2.1
		Layanan Rujukan	465	66	14.19
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	531	69	12.99



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
	terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial diluar panti			
		Layanan Data dan Pengaduan	531	69	12.99
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	531	-	-
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	531	15	2.8
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	531	0	-
		Penyediaan Permakanan	531	15	2.8
		Penyediaan Sandang	531	15	2.8
		Penyediaan Alat Bantu	531	9	1.6
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	531	-	-
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	531	69	12.99



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	531	84	15.31
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	531	-	-
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	531	-	-
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	531	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	531	-	-
		Layanan Rujukan	531	-	-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1.401	124	8.8
		Layanan Data dan Pengaduan	1.401	124	8.8
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1.401	1	0.07
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan	1.401	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Pengadaan Kendaraan Baru			
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	1.401	-	-
		Penyediaan Permakanan	1.401	68	4.85
		Penyediaan Sandang	1.401	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	1.401	-	-
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1.401	-	-
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1.401	128	9.13
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	1.401	25	1.78
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1.401	2	0.14
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	1.401	-	-
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.401	23	1.64



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.401	8	0.57
		Layanan Rujukan	1.401	32	2.2
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	16.699	6.364	38.11
		Penyediaan Permakanan	16.699	6.364	38.11
		Penyediaan Sandang	6.924	-	-
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2	2	100
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10.355	10.355	100
		Pelayanan Dukungan Psikososial	16.699	16.699	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
			%	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1,94	95.12
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15,3	28.17
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	12.99
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	7,74	8.8
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	38.11



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
			%	%
	bagi korban bencana kabupaten			

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM			
	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	208.317.000	203.058.000	97.48
	Fasilitasi dan Koordinasi			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	114.260.000,00	113.844.500,00	99.64
	Fasilitasi dan Koordinasi			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar	35.025.000	30.188.500,00	86,19
	Fasilitasi dan Koordinasi			
	Jaminan Sosial	59.032.000	59.025.000	99.99
2	PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	894.568.000	873.231.110	97.61
	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	503.988.000	489.786.860	97.18
	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	243.320.500	242.292.750	99.58
3	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	495.194.750	485.432.750	98.03
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia	428.515.750	426.303.250	99.48
	Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	61.287.500	54.054.500	88.20



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	5.391.500	5.391.500	94.13

5. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	18	Orang
	Tenaga kontrak	30	Orang
Jumlah total		48	Orang
	Struktural	12	Orang
	Pelaksana	6	Orang
Bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial		10	Orang
Bidang Pemberdayaan Sosial		13	Orang
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		9	Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Shelter Sosial belum memfasilitasi seluruh jenis dan kuota PMKS.
2. Terbatasnya Jumlah anggaran akibat adanya pandemi covid 19.
3. Keterlibatan PSKS dalam penanganan masalah sosial belum optimal.
4. Subyektifitas pendataan di masyarakat masih tinggi
5. Terbatasnya akses ke aplikasi SIKS NG
6. Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron untuk penanganan kemiskinan.
7. Dalam penanganan kemiskinan OPD terkait belum menggunakan data kemiskinan yang ada di dinas social
8. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terus bertambah

B. Solusi

1. Di usulkan untuk pembangunan rumah singgah pada anggaran tahun berikutnya.
2. Mengusulakn untuk penambahan anggaran untuk meningkatkan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

capaian SPM

3. Mendorong kepedulian PSKS yang berbasis masyarakat untuk turut aktif dalam penanganan PMKS melalui Aplikasi e- Peduli
4. Melakukan komunikasi dengan pihak Desa melalui Kecamatan agar pendataan dan perubahan DTKS betul betul obyektif
5. Melakukan update data kemiskinan dengan OPD yang memiliki program/kegiatan pengentasan kemiskinan
6. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengusulkan ke Provinsi dan Kementerian Sosial.



BAB III

HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EKPPD TAHUN 2020

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 sampai dengan saat ini belum ada *realese* resmi dari Kementerian Dalam Negeri, namun untuk capaian Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 masih tetap menjadi acuan kami untuk memprediksi capaian hasil EKPPD Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 .

capaian Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120.04/3545/SJ Tanggal 08 Mei 2019 tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Tataran Pengambil Kebijakan

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap Tataran pengambil kebijakan, yakni Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada Tataran pelaksana Kebijakan Daerah, yakni kinerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 indikator kinerja kunci (IKK). Penilaian pada tataran pengambil kebijakan mendapatkan 3,6450 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH IKK	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	34	79,07
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2	4,65
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	6	13,95
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	2,33
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
Jumlah	43	100,00

1. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran pelaksana kebijakan daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan daerah mendapatkan skor 3,1233 atau dengan kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

a) Aspek Administrasi Umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup 23 Urusan wajib dan 6 urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek umum mendapatkan skor 3,0312 atau dengan kategori prestasi Tinggi dengan Rincian sebagai berikut :

1) Skor dan Prestasi per Aspek

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan	2,9265	T
2	Ketaatan terhadap peraturan / Undang-undang	3,5294	ST
3	Penataan Kelembagaan	2,5735	T
4	Pengelolaan Kepegawaian	3,1882	ST
5	Perencanaan pembangunan	3,5294	ST
6	Pengelolaan keuangan	2,0912	T
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,5294	ST
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	3,2000	ST

2) Skor dan Prestasi per IKK

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	470	74,60
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	24	3,81
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	25	3,97
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	111	17,62
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan	0	0
Jumlah	630	100,00

3) Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan : Sosial yaitu sebesar 3,8095.
- Skor terendah dengan prestasi Rendah terdapat pada urusan Transmigrasi yaitu sebesar 2,9524.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

b) Urusan Pemerintahan

Usuran pemerintahan terdiri dari 23 Urusan Wajib, 6 urusan Pilihan dan fungsi penunjang Pemerintahan Umum

Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor 3,1847 atau mendapat kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

1) Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang

Usuran wajib dan Fungsi Penunjang secara keseluruhan memperoleh skor 3,1371 dengan kategori prestasi Sangat Tinggi. Hasil evaluasi atas 23 urusan wajib sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	11	45,82
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	10	41,67
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	1	4,17
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	4,17
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
FP yang memperoleh kategori sangat tinggi	1	4,17
Jumlah	24	100,00

Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 4 (empat) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu 4,0000 ada pada urusan : penanaman Modal, ketenagakerjaan, Perhubungan, dan statistik

Skor dengan prestasi Rendah terdapat pada 1 (satu) urusan dengan nilai skor terendah 1,0000 ada pada urusan kepemudaan dan olahraga.

Dari 23 urusan wajib terdapat 6 (enam) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 6 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Pendidikan	3,4000	ST
2	Kesehatan	3,1250	ST
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	2,6000	T
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman	3,6663	ST
5	Sosial	3,6663	ST
6	Trantibum dan Linmas	2,0000	S



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) urusan dan mendapatkan skor 3,3750 dengan kategori prestasi Tinggi. Hasil evaluasi atas 6 urusan pilihan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	4
UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2
UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang	0
UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah	0
UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0
Jumlah	6

Skor tertinggi sebesar 4,0000 dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 1 (satu) urusan yaitu Kelautan dan Perikanan dan Transmigrasi
Skor terendah sebesar 2,5000 dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

2. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,0000

3. Kesimpulan EKPPD Kabupaten Lumajang

Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 21 (dua puluh satu) dari 38 Kabupaten/Kota dengan skor 3,3033 atau dengan **kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2021, realisasi opini BPK terhadap LKPD Tahun 2020 masih belum dapat disajikan, karena opini BPK terhadap LKPD biasanya terbit pada bulan Mei tahun anggaran berikutnya. Meskipun demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang atas indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD tahun 2019 yang diterima di tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dan, hal ini memotivasi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dapat mempertahankannya untuk LKPD tahun 2020, sehingga data sementara untuk capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah pada indikator Opini BPK terhadap LKPD kami isikan WTP atau tercapai 100%, sehingga prediksi 3 Tahun berturut-turut pada Tahun RPJMD 2018-2023 Opini yang diperoleh adalah WTP dan capaian kerjanya 100%



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Optimalnya Sistem Informasi Penyusunan APBD :
 - Terintegrasinya SIP-APBD dengan E-Planning
 - Aplikasi Standart Biaya / Standart Harga yang sudah terintegrasi dengan SIP-APBD
 2. Optimalnya SIPKD penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah :
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur pengguna SIPKD
 - Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet
 - Optimalnya pemanfaatan IT dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan.
 3. Penerbitan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Optimalnya peran Tim Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap untuk melakukan koordinasi, inventarisasi dan validasi data aset tetap.
 - Terlaksananya penelusuran bukti kepemilikan aset tetap.
 - Terlaksananya pensertifikatan tanah secara bertahap.
 - Inventarisasi dan validasi aset tetap
- Pengelolaan BMD berbasis IT/ SIMBADA



BAB IV
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2020 senantiasa menganut prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah agar dapat terjaga kesinambungan dan keterpaduan program-program yang telah direncanakan. Realisasi APBD Tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.104.300.585.569,86 dan terealisasi sebesar Rp. 2.118.792.462.262,77 atau sebesar 100,69%. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
A	PENDAPATAN	2.104.300.585.569,86	2.118.792.462.262,77	(14.491.876.692,91)	100,69
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.977.944.540,86	300.258.568.642,77	(19.280.624.101,91)	106,86
	Hasil Pajak Daerah	70.000.000.000,00	686.659.995.181,00	1.340.004.819,00	98,09
	Hasil Retribusi Daerah	50.019.898.222,00	46.060.581.317,00	3.959.316.905,00	92,08
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.105.516.366,26	5.105.516.366,26	0,00	100,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.852.529.952,60	180.432.475.778,51	(24.579.945.825,91)	115,77
2	DANA PERIMBANGAN	1.292.726.757.634,00	1.271.212.220.474,00	21.514.537.160,00	98,34
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96.234.848.515,00	90.017.283.661,00	6.217.564.854,00	93,54
	Dana Alokasi Umum	920.012.364.000,00	908.166.706.000,00	11.845.658.000,00	98,71
	Dana Alokasi Khusus	276.479.545.119,00	273.028.230.813,00	3.451.314.306,00	98,75



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	530.595.883.395,00	547.321.673.146,00	(16.725.789.751,00)	103,15
	Pendapatan Hibah	99.546.803.000,00	90.502.574.768,00	9.044.228.232,00	90,91
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.928.704.266,00	123.312.451.789,00	(23.383.747.523,00)	123,40
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	227.364.377.000,00	227.364.377.000,00	0,00	100,00
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	103.629.091.750,00	103.629.091.750,00	0,00	100,00
	Sumbangan Pihak Ketiga	126.907.379,00	161.236.924,00	(34.329.545,00)	127,05
	Pendapatan Lainnya	0,00	2.351.940.915,00	(2.351.940.915,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.104.300.585.569,86	2.118.792.462.262,77	14.491.876.692,91	100,69

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, Per tanggal 9 Februari 2021 (Unaudited)

2) Realisasi belanja menurut jenis belanja

Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, teranggkarkan sebesar Rp 2.191.780.123.105,47 dengan realisasi sebesar Rp 2.028.711.032.400,21 atau sebesar 92,56 persen.

Berdasarkan jenisnya, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Adapun realisasi Belanja Daerah menurut kelompok belanja terinci sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.2 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	2.191.780.123.105,47	2.028.711.032.400,21	92,56
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.301.225.816.578,21	1.237.222.289.940,63	95,08
1.	Belanja Pegawai	743.580.746.750,21	704.183.262.724,00	94,70
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	127.793.251.752,00	125.225.839.973,00	97,99
5.	Belanja Bantuan Sosial	62.078.956.767,00	56.511.642.496,65	91,03
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan	333.325.365.265,00	333.267.865.264,00	99,98
8.	Belanja Tak Terduga	34.447.496.044,00	18.033.679.482,98	52,35
B.	BELANJA LANGSUNG	890.554.306.527,26	791.488.742.459,58	88,88
1.	Belanja Pegawai	46.567.353.681,00	37.448.664.717,00	80,42
2.	Belanja Barang dan Jasa	628.632.611.691,95	555.894.485.261,32	88,43
3.	Belanja Modal Tanah	766.852.900,00	747.987.360,00	97,54
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.926.729.040,00	61.177.461.037,90	87,49
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.995.497.778,43	23.973.023.775,62	92,22
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	106.919.970.137,00	101.925.745.491,74	95,33
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.483.862.450,00	6.346.598.272,00	97,88
8.	Belanja Modal Aset Lainnya	5.261.428.848,88	3.974.776.544,00	75,55
	JUMLAH BELANJA	2.191.780.123.105,47	2.028.711.032.400,21	92,56

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, Per tanggal 9 Februari 2021 (Unaudited)



3. Permasalahan Pendapatan Daerah

Secara umum permasalahan pendapatan yang terjadi di daerah adalah :

- a) Belum lengkapnya data base tentang pajak dan retribusi daerah;
- b) Kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal:
 - Tidak tertibnya penggunaan benda berharga dari SKPD Penghasil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk memungut retribusi daerah;
 - Terlambatnya cetak benda berharga sangat berpengaruh terhadap pemungutan retribusi daerah, sehingga berpengaruh terhadap kurang tertibnya administrasi.
- c) Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (Penegak Perda);
- d) Kurangnya koordinasi Internal dengan unit kerja yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah :
 - Belum maksimalnya pengurusan IMB yang dilimpahkan dari dinas PU ke kecamatan.
- e) Belum optimalnya tingkat pengendalian (belum terbangunnya sistem on line yang terintegrasi antara SKPD Penghasil dengan DPMPST selaku penerbit ijin;
- f) Keterbatasan Kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi daerah dalam bidang pekerjaannya.

4. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi untuk meningkatkan fungsi koordinasi;
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah.



5. Permasalahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja yang terjadi di daerah adalah

- a. Realisasi belanja SKPD tidak sesuai target;
- b. Penyerapan realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.

6. Solusi

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Evaluasi secara rutin penyerapan anggaran oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).

7. Permasalahan pembiayaan

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup devisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup devisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

BAB V
INOVASI DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Daftar Inventarisasi Judul Program Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020

NO.	PELAKSANA	INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3
1	Dinas Kesehatan- RSUD Pasirian	TAPE MANIS (Peningkatan Kepatuhan Diet Pasien Kencing Manis)
2	Dinas Kesehatan- Puskesmas Jatiroto	Menurunkan waktu tunggu pasien di ruang pendaftaran Puskesmas Jatiroto dari 5 menit/pasien menjadi 1 menit/pasien
3	Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk mengujikan kendaraannya tepat waktu

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020**

4	Bakesbangpol	SIP BOS (Sistem Informasi Pelayanan Berbasis <i>Online System</i>)
5	Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi	Menurunkan jumlah keterlambatan peserta dalam menghadiri rapat melalui pemberian perlakuan khusus bagi peserta yang datang terlambat
6	Sekretariat Daerah-Bagian Administrasi Pemerintahan	Penertiban Kertas Berkas / Dokumen Yang Sudah Tidak Terpakai Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Lumajang
7	DPKP	Pelayanan online untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat
8	Kecamatan Jatiroto	Pemberian santunan kematian langsung diantar ke rumah warga yang kurang mampu

Sumber : Bappeda, data untuk inovasi Tahun 2020 di 2021

Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Lumajang atas inovasi pelayanan publik nya adalah sebagai berikut :

No	Nama Penghargaan	Diterima Pada
1.	Penghargaan Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan Spip Level 3 Dan Kapabilitas Apip Level 3	Januari 2020
2.	Penghargaan Atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) Pada Sakip Award 2019 Dengan Kategori B	Januari 2020
3.	Penghargaan Sertifikat Layak Untuk Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Ri	Januari 2020
4.	Penghargaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dari Kementerian Pertanian	Januari 2020
5.	Juara II Lomba Video New Normal Sektor Pasar Tradisional Covid-19 Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Juni 2020
6.	Juara III Lomba Video New Normal Sektor Restoran Covid-19 Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Juni 2020
7.	Penghargaan Sekolah Tertib Berbahasa Terbaik Se-Jawa Timur Dalam Lomba Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2020	Agustus 2020
8.	Penghargaan PERPUSDES Sumber Ilmu Labruk Kidul Raih Juara 2 Lomba Perpustakaan Prov. Jatim	Oktober 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

9.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Tahun Anggaran 2019	Oktober 2020
10.	Penghargaan Upakarti Tahun 2020 Kategori Jasa Pengabdian	Desember 2020
11.	Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	Desember 2020

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang Tahun 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

BAB VI
PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020 mencakup urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari Penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2020 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain itu, RLPPD merupakan sarana untuk masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Lumajang kepada Menteri dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2020 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

Demikian penyampaian RLPPD Kabupaten Lumajang tahun 2020, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Lumajang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.